

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Medan Area terdiri adalah menggunakan kajian teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards. Dimana kajian itu dapat menjawab tujuan penelitian, yaitu:

5.1.1 Proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan Akreditasi sekolah dilakukan dengan rapat terbatas, yaitu

- 1) BAP S/M melakukan kordinasi dengan KPA-S/M Kota Medan untuk membahas proses pelaksanaan Akreditasi sekolah dengan memberikan instruksi/surat pemberitahuan kepada BAP-SM dan KPA-SM
- 2) Selanjutnya BAP – S/M bersama-sama dengan KPA-S/M Kota Medan melakukan rapat terbatas dengan sekolah sasaran sesuai dengan tempat dan waktu yang ditentukan mengenai Instrumen pelaksanaan Akreditasi.

5.1.2 Bentuk dukungan sumber daya dalam Implementasi Akreditasi sekolah di SD Negeri Kecamatan Medan Area adalah:

- 1) Jumlah pelaksana kegiatan Akreditasi di SD Negeri Kecamatan Medan Area sebanyak 5 orang, yang terdiri dari 1 koodinator merangkap anggota dan 4 anggota yang tergabung dalam satuan KPA-S/M

- 2) KPA-S/M dibantu oleh 2-4 orang asesor yang telah ditentukan oleh BAP-S/M berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.
- 3) Segala sumber finansial/bentuk biaya pelaksanaan Implementasi Akreditasi dibebankan ke APBN.
- 4) Kegiatan Akreditasi di SD Negeri dengan memanfaatkan fasilitas IT (informasi dan teknologi) khususnya di Web SISPENA

5.1.3 Bentuk dukungan disposisi/komitmen terhadap implementasi Akreditasi SD Negeri Kecamatan Medan Area, adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya sikap keterbukaan pemerintah akan penerimaan calon asesor Akreditasi sekolah dengan membuka Pendaftaran melalui pemberkasan dan pelatihan bagi calon Asesor
- 2) BAP-S-M dan KPA-S/M dengan komitmen yang nyata melaksanakan proses implementasi Akreditasi dengan tepat waktu. Mulai dari proses sosialisasi hingga penerbitan sertifikat Akreditasi berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 3) Pemberian insentif pengganti transpor kepada anggota BAP-S/M maupun KPA-S/M memberikan tambahan semangat dalam bekerja.

5.1.4 Bentuk dukungan birokrasi terhadap implementasi Akreditasi SD Negeri Kecamatan Medan Area adalah sebagai berikut:

- 1) Fragmentasi dalam bentuk struktur organisasi yang jelas menunjukkan bahwa BAP-S/M maupun KPA-S/M adalah sebuah badan yang resmi dan memiliki tupoksi yang jelas.

- 2) Adanya buku panduan (Standar Operasional Prosedur) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan implementasi Akreditasi yang berlaku.

5.1.5 Bentuk konsistensi implementasi Akreditasi SD Negeri Kecamatan Medan Area adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan implementasi Akreditasi di SD Negeri Kecamatan Medan Area mempunyai tujuan yang jelas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (POS) pada Buku Panduan yang diberikan BAP-SM.
- 2) Implementasi kebijakan Akreditasi dimulai dengan membuat sebuah program kemudian melakukan komunikasi/sosialisasi rapat terbatas dengan melibatkan sumber daya yang ada, dan kebijakan Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk atau POS.
- 3) Tahapan pelaksanaan dimulai dari: a) penetapan sasaran Akreditasi Sekolah/Madrasah, b) penetapan Sekolah/Madrasah sasaran visitasi dan penugasan Asesor, c) visitasi ke Sekolah/Madrasah, d) validasi proses dan hasil visitasi, e) verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi, f) penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi, g) penerbitan sertifikat Akreditasi dan rekomendasi, dan h) sosialisasi hasil akreditasi.

5.2. Implikasi

Implikasi dapat dirumuskan berdasarkan temuan-temuan penelitian yang merupakan konsekuensi untuk mencapai kondisi ideal dalam melaksanakan kebijakan publik implementasi akreditasi Sekolah Dasar di Kecamatan Medan

Area supaya implementasi akreditasi berjalan sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Maka Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi antara lain:

5.2.1 Komunikasi/Soasilisasi

Komunikasi pelaksanaan implementasi kebijakan akreditasi yang dilakukan melalui rapat terbatas memberikan manfaat yang baik bagi implementor kebijakan. Sehingga baik pihak BAP-S/M, KPA-S/M maupun sekolah sasaran dapat berinteraksi langsung dan saling merespon terhadap pelaksanaan kebijakan akreditasi pada saat rapat berlangsung sehingga kesalah-pahaman akan kebijakan kecil kemungkinan terjadi.

5.2.2 Dukungan Sumber Daya

Dukungan sumber daya manusia yang handal dalam bidang akreditasi memberikan dampak yang baik pada lancarnya proses implementasi akreditasi terjadi. Dengan adanya Asesor yang sudah berpengalaman dalam bidang akreditasi memberikan penilaian yang tepat terhadap hasil kinerja sekolah sasaran. Dukungan finansial dalam proses implementasi akreditasi yang dibebankan pada APBN memberi kemudahan dan kelancara proses implementasi, baik pada pihak BAP-S/M, KPA-S/M, maupun sekolah sasaran.

5.2.3 Dukungan Disposisi

Bentuk komitmen ketepatan waktu pelaksanaan dan tepatnya sasaran kebijakan yang ditunjukkan oleh BAP-S/M, KPA-S/M mendorong sekolah sasaran memanfaatkan setiap waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Pemberian insentif kepada anggota BAP-S/M, KPA-S/M memberikan motivasi kepada anggota tim akreditasi dalam bekerja.

5.2.4 Dukungan Birokrasi

Adanya struktur organisasi, tupoksi, dan buku pedoman (SOP) yang jelas menjadikan proses implementasi akreditasi berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

5.2.5 Konsistensi Kebijakan

Konsistensi kebijakan akreditasi yang dilakukan BAP-S/M, KPA-S/M yang dimulai dari proses penetapan sasaran Akreditasi Sekolah/Madrasah, penetapan Sekolah/Madrasah sasaran visitasi dan penugasan Asesor, visitasi ke Sekolah/Madrasah, validasi proses dan hasil visitasi, verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi, penerbitan sertifikat Akreditasi dan rekomendasi, dan sosialisasi hasil akreditasi merupakan wujud langkah strategis yang dilakukan bersama antara BAP-S/M, KPA-S/M dengan sekolah sasaran.

5.3 Saran

5.3.1 BAP-SM Sumatera Utara dan KAP-S/M Medan Area

Sebaiknya bentuk sosialisasi langsung mengenai program-program atau kegiatan yang dilaksanakan terkait Akreditasi sekolah dasar tidak hanya kepada manajemen sekolah saja, akan tetapi kepada masyarakat (orang tua siswa/wali murid) juga, supaya masyarakat memperoleh edukasi akan kebermaknaan Akreditasi.

5.3.2 Koordinator KPA Kota Medan

Diharapkan Koordinator KPA kota Medan lebih mengoptimalkan dalam memberikan Informasi yang terkait dengan kepentingan Akreditasi Sekolah.

5.3.3 Koordinator Sekolah Kecamatan Medan Area

Keberadaan Koordinator Sekolah Kecamatan Medan Area diharapkan mampu menjadi Tolak Ukur untuk terlaksananya kebijakan Akreditasi sekolah khususnya di Medan Area.

5.3.4 Kepala Sekolah Sasaran

Sebaiknya kepala sekolah harus menyadari bahwa program Akreditasi bukan sekadar memberikan nilai Akreditasi A, B, C dan Belum Terakreditasi, tetapi bagaimana seluruh *stakeholders* sekolah harus bisa meningkatkan kualitas sekolah demi meningkatkan mutu output sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan oleh masing-masing sekolah kedalam bentuk visi, misi, dan tujuan sekolah.

Perlu adanya penelitian lanjutan. Penelitian ini masih didasarkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan pengamatan yang terbatas waktunya sehingga masih terdapat kelemahan. Temuan penelitian terbaru, kini sistim layanan Akreditasi telah menempuh jalur *on-line*. Peraturan yang terbilang masih baru, dan kurangnya sosialisasi, SOP yang masih dalam taraf pembahasan sehingga dianjurkan untuk melihat implementasi secara lebih komprehensif dan teliti mengenai pelaksanaan upaya pelaksanaan Akreditasi.